SISTEM KEKERABATAN, KELUARGA, DAN PERANAN PRIA DALAM KETURUNAN

Parsudi Suparlan
(Universitas Indonesia)

Abstract

Economic and sociological models have been dominating the studies and policies on lowering the fertility rates. One of the interdisciplinary models as used by Terence Hull focusses the unit analysis on the people's preferences in the decision making process, as well as the influence of socio-economic variables, i.e. price and income. Culture and kinship systems are often ignored in those models. This article examines the importance of incorporating the analysis of kinship system in the theoretical models as well as in the policy making process concerning the fertility rate. The significance of kinship system is illustrated by the role of men in the reproductive process as influenced by the kinship system in the patrilineal, matrilineal, and bilateral descents in some ethnic groups in Indonesia.

Pendahuluan

Model-model ekonomi dan sosiologi telah mendominasi kajian-kajian dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk penurunan tingkat fertilitas. Di satu pihak, masing-masing model ini saling berjalan sendiri-sendiri dan bahkan, dalam mo-

Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan dalam Seminar Peranan Pria dalam Penurunan Fertilitas, yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 16-17 September 1988.

del-model ekonomi, terdapat saling perbedaan yang mendasar. Di pihak lain, terdapat usaha penggabungan model-model yang berlainan tersebut, sehingga terwujud sebagai pendekatan antarbidang. Terence Hull (1976) misalnya, telah mengusahakan sebuah pendekatan antarbidang, yang memperhitungkan variabel-variabel sosial dan ekonomi dalam sebuah model pendekatan untuk kajian fertilitas. Dalam model tersebut, penekanan sasaran analisisnya terletak pada selera individu dalam hal pengambilan keputusan, di samping memperhitungkan variabel harga (*price*) dan pendapatan (*income*).

Model-model kajian fertilitas tersebut di atas sebenarnya adalah refleksi dari kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat Barat, khususnya Amerika. Masyarakat dan kebudayaan tersebut bercorak heterogen, bercorak ekonomi uang dengan tingkat kehidupan ekonomi dan sosial yang relatif maju, serta sistem kekerabatan yang bilateral dengan keluarga batih (*nuclear family*) yang berdiri sendiri (*independent*). Karena itu, hubungan kedudukan suami-isteri adalah hubungan personal dua individu dengan perhitungan-perhitungan ekonomi (*price* dan *income*) dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah domestik atau rumahtangga, termasuk fertilitas. Jadi dalam masyarakat Barat dengan sistem kekerabatan bilateral, masalah fertilitas adalah urusan sebuah keluarga atau rumahtangga. Selain itu, dunia domestik dalam konsep kebudayaan tersebut adalah dunia kaum wanita. Oleh sebab itu satuan sasaran untuk kajian dan usaha penurunan fertilitas adalah wanita, karena secara hipotesis, wanitalah yang secara kebudayaan mendominasi pengambilan keputusan mengenai hal ini. Itulah sebabnya maka dalam konsep-konsep dan teori-teori yang mendasar yang mencerminkan ruang lingkup dan pendekatan metodologi kajian fertilitas, masalah kekerabatan atau juga masalah kebudayaan tidak diperhitungkan, atau kalau juga diperhiungkan, hanya diperlakukan sebagai kembangan saja (lihat Kammeyer, 1977).

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan patut diperhitungkan secara sungguh-sungguh dalam kajian-kajian dan kebijaksanaan-kebijaksanaan fertilitas, khususnya untuk Indonesia di mana pengaruh dari berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekerabatan adalah penting. Hal yang akan diperlihatkan dalam tulisan ini adalah: bagaimana sistem kekerabatan sebagai sebuah model pengetahuan saling berkaitan dan mempengaruhi model-model pengetahuan lainnya yang terdapat dalam sebuah kebudayaan, bagaimana model-model normatif dan ideal yang ditekankan dalam sistem kekerabatan itu operasional melalui pranata keluarga, dan seperti apakah peranan pria dalam menghasilkan keturunan sebagaimana ditekankan dalam sistem kekerabatan.

Sistem Kekerabatan dan Keluarga

Disadari ataupun tidak, sebenarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang

tidak terjerat dan diatur kehidupannya dalam berbagai aturan kekerabatan dan keluarga. Secara sadar ataupun tidak, sebenarnya kita masing-masing mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam sistem kekerabatan yang kita punyai sesuai dengan kebudayaan kita masing-masing. Hal itu disebabkan adanya saat-saat dalam hidup kita masing-masing di mana petunjuk-petunjuk yang bersumber pada sistem kekerabatan dan para kerabat kita menjadi penting, yaitu dalam lingkaran hidup (*life cycle*) kita (dari tahap dalam kandungan sampai mati). Tahap yang terpenting dari semua tahap dalam lingkaran hidup itu adalah tahap perkawinan dan kehidupan sebagai suami-istri.

Tidak ada sebuah kebudayaan pun di dunia ini yang tidak menekankan pentingnya berkembang biak, memperbanyak keturunan, dan meningkatkan mutu keturunan untuk meningkatkan martabat nenek-moyangnya. Penekanan tersebut dioperasionalkan melalui sistem kekerabatan yang menekankan pada keharusan-keharusan memperoleh keturunan melalui berbagai petunjuk yang ada dalam kebudayaannya. Petunjuk-petunjuk tersebut mencakup: apa peran pria dan wanita, persetubuhan dan perkawinan, siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh dijadikan pasangan hidup, serta siapa-siapa (pria dan wanita) yang pantas dijadikan pasangan hidup untuk kebahagiaan secara biologi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, petunjuk-petunjuk tersebut mencakup juga peranan (hak dan kewajiban) orang tua dan kerabat dari calon pengantin dalam penentuan perkawinan dan kehidupan keluarga, baik yang baru terbentuk maupun yang sudah mapan. Semuanya itu — dari satu segi — dapat dilihat sebagai seperangkat pedoman untuk memperoleh keturunan, meningkatkan keturunan, dan agar keturunan meningkatkan derajat sosial dan kebudayaan nenek-moyangnya.

Pada sejumlah sistem kekerabatan, peranan dari sistem kekerabatan— melalui kelompok-kelompok kekerabatan — amat penting, yaitu dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan bilateral, peranan sistem kekerabatan kurang atau tidak begitu penting, sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal, mempunyai anak merupakan hal yang amat penting. Khususnya, mempunyai anak laki-laki teramat penting, karena tanpa anak, dan khususnya tanpa anak laki-laki, garis keturunan akan punah. Keluarga yang tidak mempunyai anak mempunyai kedudukan sosial yang dinilai belum sempurna dan dikasihani oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki penting untuk penerus garis keturunan (*marga* atau *clan*). Anak laki-laki yang mewariskan nama *marga*, harta pusaka, dan martabat keluarga dan *marga*.

Nalom Siahaan (1982) memperlihatkan betapa pentingnya sistem kekerabatan pada orang Batak, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Diperlihatkan bahwa dunia orang Batak adalah sebuah dunia kekerabatan yang diatur oleh prinsip *dalihan na tolu*. Prinsip ini pada hakikatnya menekankan pentingnya masa

lalu untuk masa depan, dan masa depan untuk masa lalu. Pengembangan perkawinan, keluarga, dan pengembangan keturunan dilihat sebagai hal yang penting untuk masa depan. Di samping itu, keturunan juga penting untuk menjaga dan menaikkan martabat masa lalu (pemugaran kuburan dan berbagai upacara yang berkaitan dengan itu) untuk menaikkan martabat para keturunan itu sendiri, yaitu *marga* dan anggota *marga*.

Dalam kaitan tersebut di atas, keluarga orang Batak dapat dilihat sebagai kepanjangan dari sistem kekerabatan Batak, yang operasional untuk menghasilkan keturunan dan menaikkan martabat *marga*. Karena itu pula ada perbedaan nama gelar bagi suami-istri dan kakek-nenek yang sudah mempunyai keturunan dan yang tidak/belum mempunyai keturunan. Seseorang yang meninggal tanpa keturunan adalah orang yang patut dikasihani, bukan hanya karena terputusnya garis keturunan melainkan juga karena tidak ada yang menghormati dan menziarahinya. Dikatakan oleh Siahaan (1982: 19, 82): "... kalau seorang meninggal tanpa keturunan, upacara penguburan disertai kesedihan yang mendalam, sebab orang Batak menaruh nilai besar terhadap adanya keturunan Adopsi total sebagai perbuatan hukum, dalam arti putus samasekali hubungan seorang anak dengan orangtua kandungnya dan sebagai gantinya mendapat orangtua baru, pada hakikatnya tidak dikenal di kalangan orang Batak." Karena itu kalau orang Batak tidak mempunyai keturunan, putuslah sudah garis keturunannya.

Dengan demikian, dalam masyarakat Batak yang patrilineal, keluarga — sebagai satuan rumah tangga dan reproduksi — dapat dilihat sebagai sebuah wadah di mana aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dalam sistem kekerabatan itu dilaksanakan. Karena itu, otonomi atau kemandirian keluarga dalam konsep kebudayaan Batak sebenarnya tidak dikenal. Para kerabat, khususnya dari pihak pria (suami) — secara langsung ataupun tidak langsung — turut mempengaruhi berbagai masalah domestik sebuah rumah tangga Batak. Hal ini lebih terasa dalam kehidupan di desa-desa, di mana peraturan menetap setelah kawin adalah patri-lokal (yaitu istri ikut dengan suami tinggal dalam lingkungan kerabat suami).

Hal yang sama sebenarnya juga terdapat dalam kehidupan orang Minangkabau, sebagaimana ditunjukkan oleh Umar Junus (1971 : 245—63) dan Mohammad Radjab (1977). Orang Minangkabau yang mengikuti prinsip keturunan matrilineal dalam sistem kekerabatannya, terbagi dalam suku-suku yang masing-masing bersumber pada satu nenek-moyang melalui garis keturunan wanita (ibu). Dengan demikian, orang yang seketurunan adalah mereka yang dapat menarik garis hubungan melalui pihak ibu. Masing-masing suku mempunyai harta pusaka, yang secara operasional dikerjakan oleh keluarga-keluarga yang diatur menurut garis ibu. Harta pusaka hanya diwariskan kepada anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya mempunyai hak guna atau hak pakai. Anak menjadi penting, khususnya anak perempuan, sebagai penyambung keturunan dan sebagai penjaga harta

pusaka yang diwarisinya. Karena itu, perkawinan dan pembentukan keluarga lebih banyak didominasi oleh keputusan-keputusan kerabat dan bukannya oleh pilihan selera individual, sama dengan yang terdapat dalam kebudayaan orang Batak. Peranan para kerabat, yaitu kerabat dari pihak ibu atau wanita, diwakilkan melalui saudara laki-laki, khususnya saudara tua. Walaupun prinsip keturunan orang Minangkabau adalah matrilineal, tetapi karena dalam kebudayaannya dibedakan antara urusan domestik dan sosial, maka yang domestik adalah urusan wanita dan yang sosial adalah urusan pria.

Dalam masyarakat Minangkabau, secara tradisional, seorang suami tinggal dalam lingkungan keluarga istrinya. Suami dalam konsep kebudayaan Minangkabau sebenarnya hanya "tamu" dalam keluarga istrinya dan lingkungan kekerabatan istrinya, karena dia tetap menjadi anggota kerabat yang diperolehnya melalui garis keturunan ibunya. Dia, yang menjadi paman atau "mamak" dari anak-anak saudara perempuannya mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan hidup para kemenakannya ini. Dengan demikian, sama tetapi berbeda dengan yang terdapat dalam keluarga orang Batak, keluarga orang Minangkabau lebih banyak dipengaruhi dan diarahkan kegiatan-kegiatan kehidupan rumahtangganya oleh para kerabat dari pihak istri atau wanita. Hal ini lebih-lebih terasa karena yang memiliki hak penuh atas sumber ekonomi (harta pusaka) adalah istri (wanita) dalam keluarga orang Minangkabau.

Dalam masyarakat yang menganut prinsip keturunan bilateral dalam sistem kekerabatannya seperti Jawa, Sunda, dan sebagainya, orang yang sekerabat adalah mereka yang sekerabat dengan bapak dan dengan ibu (melalui hubungan keturunan maupun perkawinan). Dalam sistem kekerabatan bilateral — berbeda dengan yang terdapat dalam sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang aturan-aturan mengenai hak kewajiban kekerabatan adalah ketat dan dengan sanksi-sanksi — aturan-aturan kekerabatannya bersifat longgar, dan sanksi-sanksinya lemah. Dalam sistem kekerabatan bilateral, hubungan-hubungan personal di antara individu yang sekerabat lebih menentukan jauh-dekatnya jarak sosial dan kebudayaan di antara mereka. Karena itu, dalam sistem kekerabatan bilateral, pilihan secara perseorangan mengenai pasangan kawin nampak menonjol, sejauh yang bersangkutan tidak kawin dengan seseorang yang digolongkan sebagai kerabat dekat yang dilarang secara kekerabatan.

Dalam masyarakat yang sistem bilateralnya dominan, peranan kerabat — baik dari pihak bapak (pria) atau pihak ibu (wanita) — menjadi tidak nampak dalam urusan-urusan penentuan kawin maupun dalam urusan-urusan kehidupan rumahtangga. Keluarga atau rumahtangga mempunyai hak hidup yang mandiri. Walaupun kerabat turut campur, maka keikutcampuran tersebut dilandasi oleh hubungan-hubungan personal, dan bukan karena kewajiban sebagaimana yang ditentukan menurut sistem kekerabatannya. Dalam masyarakat-masyarakat yang mengikuti

prinsip bilateral, tetapi yang juga mengembangkan adanya pengelompokan kekerabatan yang berpusat pada satu nenek-moyang, seperti yang ada pada orang Jawa dan Sunda (perkumpulan Keluarga Besar, Trah, dan sebagainya), prinsip kemandirian sebuah keluarga atau rumahtangga sebenarnya tidak sepenuhnya dikenal. Kerabat, yang secara hubungan personal dekat, yang secara sosial dan ekonomi lebih tinggi kedudukannya, dan yang dalam struktur Keluarga Besar mempunyai kedudukan tinggi dan besar pengaruhnya, sebenarnya turut campur dalam berbagai urusan rumahtangga sesuai dengan tingkat kedekatannya dengan keluarga tersebut.

Sama dengan yang terdapat dalam prinsip-prinsip kekerabatan patrilineal dan matrilineal, dalam sistem kekerabatan bilateral, sebuah keluarga sebenarnya adalah sebuah kepanjangan dari tangan-tangan kekerabatan untuk menghasilkan keturunan, yang kontrolnya dilaksanakan melalui orang tua dan kelompok-kelompok kekerabatan. Dorongan untuk segera kawin bagi pria dan wanita dewasa, dan mempunyai anak setelah berkeluarga, tidak dilakukan menurut aturan-aturan kekerabatan yang berlaku dalam sistem kekerabatannya, tetapi melalui hubungan-hubungan yang bersifat perseorangan atau personal di antara mereka yang mengikuti prinsip keturunan bilateral. Hubungan-hubungan perseorangan menjadi nampak lebih penting. Begitu juga halnya dalam faktor-faktor ekonomi dan sosial, sehingga keputusan-keputusan individual dalam keluarga sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tingkat hubungan personal yang melibatkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan para kerabat tertentu.

Keluarga dan Peranan Pria dalam Keturunan

Sebetulnya, peranan pria dalam melanjutkan keturunan tidak ada kalau tidak ada peranan wanitanya. Maka, dalam pembahasan ini, walaupun yang dibicarakan adalah peranan pria, sebenarnya secara tersirat tercakup juga peranan wanita. Kalau kita perhatikan, dalam setiap kebudayaan, ada perbedaan yang jelas antara peranan pria dan wanita dalam hal keturunan, melalui perkawinan dan keluarga. Pria dilihat sebagai pemilik dan penyebar benih, sedangkan wanita sebagai "ladang" yang ditanami benih, pemelihara benih sampai dapat tumbuh sendiri. Secara konkretnya, pria (suami) yang menghamili wanita (istri) dan wanita (istri) yang menerima benih dari pria (suami), serta yang mengandung dan membesarkannya dalam kandungan, melahirkan, dan memelihara atau mensosialisasi sampai dia dapat berdiri sendiri, atau tidak perlu disuapi lagi.

Dalam konteks kebudayaan tersebut, seringkali pengertian benih (kesuburan) disamakan dengan pengertian kejantanan (virilitas). Secara kasat mata, memang seorang pria tidak akan dapat menyebarkan benihnya kalau dia tidak jantan. Berbagai obat tradisional untuk kejantanan pria sebetulnya harus dilihat dalam konteks penyebaran benih untuk keturunan. Sekarang hal itu sudah berbeda makna

kegunaannya. Oleh sebab itu, dalam berbagai kebudayaan dikenal adanya cara-cara untuk memperkenalkan makna perkawinan bagi para pemuda sebelum mereka kawin, yaitu menggunakan kejantanannya untuk memperoleh keturunan (dalam konteks masa kini, adat tersebut dapat dilihat sebagai perbuatan a moral atau cabul). Kejantanan sangat penting. Tanpa hal itu, tentu saja seorang pria (suami) tidak dapat menghamili wanita (istri).

Sebagai pejantan, pengantin pria harus siap sedia untuk menghasilkan keturunan. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat mana pun dan dengan sistem kekerabatan apa pun, pengantin pria pada masa-masa permulaan perkawinannya mendapat perlakuan khusus dari para kerabatnya, yakni dilarang bekerja keras. Bahkan dalam masyarakat Minangkabau, sebagaimana dilukiskan oleh Rajab (1977), para menantu tidak disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Mereka seperti dimanja, sampai mereka mempunyai keturunan.

Kalau kita perhatikan hubungan antara pria sebagai pejantan dengan sistem-sistem kekerabatan pada orang Batak, Minangkabau, dan Jawa / Sunda, maka sebetulnya dapat dilihat bahwa peranan para kerabat yang membawa amanah dari aturan-aturan kebudayaannya melalui sistem-sistem kekerabatan, mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam turut menentukan pentingnya keturunan. Pada orang Batak, dorongan untuk mempunyai anak atau keturunan diperkuat oleh peranan para kerabat dari pihak pria (suami) karena setelah menikah, keluarga tinggal dalam lingkungan kerabat pria (suami). Dorongan ini menciptakan suatu estim, penghargaan sosial, yang ingin dicapai oleh para ibu (wanita) untuk mempunyai anak (yang jumlahnya banyak, terutama harus anak laki-laki), yang dapat diberikannya kepada suami dan kerabat-kerabatnya, sebagai tanda kasih sayang dan loyalitasnya kepada *marga* suami.

Pada orang Minangkabau, yang adat menetap setelah menikahnya adalah matrilokal, dan suami di "jemput" oleh pihak kerabat istri, peranan kerabat istri (wanita) dalam keturunan tidak dapat diabaikan. Pria di "jemput" atau diberi "harta hantaran" (semacam mas kawin) untuk mau kawin dengan gadis yang dicalonkan oleh kerabat gadis tersebut. Dalam konteks ini, peranan pria jelas sekali. Para kerabat wanita (istrinya) menghendaknya sebagai penyebar benih keturunan yang dapat meneruskan kelangsungan hidup sukunya. Dengan demikian, peranan para kerabat wanita (istri) amat penting dalam pengambilan keputusan mengenai keturunan.

Hal ini agak berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral. Mas kawin atau uang "jemputan" atau yang sejenis itu, tidak penting dalam pengertian harfiahnya, tetapi penting dalam pengertian maknanya. Makna yang terpenting adalah hubungan kasih dan silaturahmi yang secara sukarela (*volitional* atau *voluntary*) terjalin di antara pria dan wanita, dan melibatkan kelompok-kelompok kerabatnya. Karena itu, kedudukan dan peranan pria (suami)

dalam urusan-urusan rumahtangga, dan khususnya dalam menghasilkan keturunan, tidak dilandasi oleh adanya semacam "kewajiban" kekerabatan, tetapi oleh harapan dan dorongan para kerabat, dan khususnya para orang tua masing-masing, yang mengingini cucu untuk ditimang-timang. Hal ini dapat terjadi karena adat menetap setelah kawin adalah neolokal, atau terpisah dari kerabat wanita (istri) dan pria (suami). Keluarga baru tersebut diperlakukan pula sebagai sebuah keluarga yang mandiri, sebagai sebuah satuan sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Dalam kasus-kasus di mana keluarga baru tersebut hidup bersama dengan, dan dalam lingkungan keluarga atau kerabat suami, maka kerabat suami mempunyai peranan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan mengenai keturunan. Hal yang sama juga berlaku apabila keluarga baru tersebut hidup bersama dengan keluarga atau kerabat wanita (istri).

Kesimpulan

Kajian-kajian mengenai fertilitas dan kependudukan yang banyak telah dilakukan oleh Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada, yang menggunakan model Barat seperti telah dikemukakan, mungkin menarik untuk dikaji. Pengkajian untuk kesempurnaan modelnya. Pengkajian untuk melihat teori-teori yang telah dikembangkannya itu tidak semata-mata untuk pembuatan prediksi—karena yang ini juga sering melenceng dari yang diprediksi—tetapi dalam konteks kegunaannya dalam menciptakan dan menganalisis masalah kependudukan dan fertilitas yang dapat diterapkan untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sebuah contoh dari publikasi Lembaga Kependudukan tersebut adalah Laporan Masri Singarimbun dan Chris Manning (1976), dan Masri Singarimbun dan Karto (1976), yang kedua-duanya menggunakan model Barat tersebut, tetapi yang dapat diterapkan untuk masyarakat Jawa, karena prinsip-prinsip kekerabatannya yang kira-kira sama dengan prinsip-prinsip kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Barat. Mungkin akan menarik hasilnya kalau kajian-kajian Masri Singarimbun dan kawan-kawannya tersebut, mencakup juga kajian-kajian mengenai peranan sistem kekerabatan dan kerabat dalam pengambilan keputusan fertilitas. Hasil-hasil kajian ini mungkin akan dapat memberikan sumbangan dalam menjawab pertanyaan: mengapa di atas kertas fertilitas sudah turun, tetapi dalam kenyataan jumlah penduduk tambah terus.

Dalam teori-teori sosiologi ada suatu premis yang mengatakan bahwa dalam masyarakat modern — dan ini diwakili oleh masyarakat perkotaan — unsur-unsur tradisional menghilang. Warga masyarakat yang tadinya menekankan pentingnya *peguyuban* menjadi berubah ke masyarakat yang menekankan pentingnya *petembayan*. Masyarakat yang tadinya senang bergotong-royong dan tolong-menolong menjadi mementingkan diri sendiri, dan yang tadinya saling kenal mengenal menjadi anomi atau tidak saling kenal mengenal. Premis ini mungkin harus dilihat

secara hati-hati, dan dilihat operasionalisasinya secara selektif dalam *setting-setting* atau arena-arena kehidupan yang berlaku dalam masyarakat modern atau perkotaan. Dari data yang dikumpulkan dan dari teori-teori yang dikembangkan dalam antropologi, premis sosiologi tersebut sebenarnya tidak betul, karena hal itu hanyalah tipe ideal untuk dikotomisasi desa-kota.

Bruner, (1959; 1963; 1972; 1973; 1974a; 1974b) dan juga Cohen (1969), di antara para ahli antropologi, telah menunjukkan bahwa dalam masyarakat perkotaan (modern), kebudayaan suku bangsa dan khususnya sistem kekerabatan dan pengelompokan kekerabatan serta solidaritasnya, tidak hilang begitu saja. Bahkan sebenarnya hal itu tetap dipertahankan dan dikembangkan, karena fungsional sebagai perangkat untuk adaptasi dalam struktur kehidupan di perkotaan serta berguna untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik yang terdapat dalam sistem-sistem perkotaan. Pendapat Bruner dan Cohen tersebut didukung oleh penemuan Siahaan yang membahas adat *dalihan na tolu*, yang memperlihatkan bahwa adat Batak di mana pun akan tetap berlangsung selama masih ada orang Batak. Hal yang sama sebenarnya juga dapat dilihat dalam kasus-kasus orang Minangkabau, sebagaimana yang terdapat dalam skripsi-skripsi Jurusan Antropologi Universitas Indonesia, dan dalam kasus-kasus orang Jawa dan Sunda dengan muncul dan berkembangnya pengelompokan-pengelompokan melalui prinsip seasal seketurunan.

Dengan demikian, secara model teoretikal, kajian mengenai kekerabatan dan kerabat dalam model teoretikal fertilitas yang selama ini telah dilakukan harus dimasukkan sebagai bagian integral dari model teoretikal tersebut. Pada tingkat kebijaksanaan kampanye fertilitas, mungkin dapat dipikirkan berbagai metode/teknik yang relevan untuk mengetahui tingkat peranan kekerabatan dan tingkat peranan pria dalam pengambilan keputusan fertilitas pada tingkat keluarga, pada tingkat kegiatan-kegiatan kerabat yang berlaku setempat.

Daftar Pustaka

Bruner, E. M.

- 1959 "Kinship Organization among the Urban Batak of Sumatra", *Transactions of the New York Academy of Sciences*.
- 1963 "Medan, the Role of Kinship in an Indonesian City", *American Anthropologist*, 63.
- 1972 *Batak Ethnic Associations in Three Indonesian Cities*. Madison: Albuquerque.
- 1974 "The Expression of Ethnicity in Indonesian Cities", dalam Cohen (peny.), *Urban Ethnicity*. New York: Tavistock.

- 1974b *Indonesian Homecoming: a Case Study in the Analysis of Ritual*. Urbana-Champaign: University of Illinois.
- Cohen, A.
1969 *Customs and Politics in Urban Africa*. Berkeley: University of California Press.
- Hull, T.
1976 *Units of Analysis in the Study of Fertility Decision-making*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Working Paper Series No. 6.
- Junus, U.
1971 "Kebudayaan Minangkabau", dalam Koentjaraningrat (peny.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 259 — 78.
- Kammeyer, K. C. W.
1977 *Fertilitas*. (diterjemahkan oleh Hans Daeng). Yogyakarta: Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Seri terjemahan No. 8.
- Koentjaraningrat (peny.).
1971 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Rajab, M.
1977 *Sistem Kekerabatan Orang Minangkabau*. Jakarta: Grafina.
- Siahaan, N.
1982 *Adat Dalihan na Tolu*. Jakarta: Grafina.
- Singarimbun, M. dan Ch. Manning.
1976 *Fertility and Family Planning in Mojolama*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Singarimbun, M. dan Kasto
1976 *Proyek Dwikarti*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada.